

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI TERHADAP
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
DI SMPN KOTA PONTIANAK**

Oleh
FITRI GUNAWAN^{1*}

NIM. E1012131100

Sugito², Pardi²

*Email : fitrigunawan@student.untan.ac.id

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang menyebabkan Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMPN Kota Pontianak belum optimal. Dalam penelitian ini difokuskan pada aspek faktor yang mempengaruhi keberhasilan Implementasi menggunakan metode penelitian deskriptif eksploratif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti memperoleh informasi dengan teknik wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menggunakan teori Van Meter dan Van Horn Budi Winarno, 2007 Hal 155, ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru di SMPN Kota Pontianak adalah 1) Ukuran dan Tujuan, dinilai belum optimal dikarenakan daya tampung sekolah tidak memadai. Secara garis besar ukuran dan tujuan dari Permendikbud No 44 Tahun 2019 sudah cukup baik namun sebelum menjalankan sistem zonasi tersebut, sebelum melakukan pemerataan pendidikan yang hanya terfokus pada siswa, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk memenuhi standar nasional pendidikan haruslah merata di seluruh sekolah dan membangun sekolah-sekolah Negeri baru di wilayah-wilayah zonasi yang sekolah negerinya minim.

Kata Kunci: implementasi kebijakan, sistem zonasi

THE IMPLEMENTATION OF THE ZONING SYSTEM IN THE ADMISSION OF JUNIOR HIGH PUBLIC SCHOOL NEW STUDENTS IN PONTIANAK CITY

By:

FITRI GUNAWAN^{1*}

ID. E1012131100

Dr. Sugito, M.Si.², Dr. Pardi, M.AB.²

*Email : fitrigunawan@student.untan.ac.id

1. Student of Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Science, Universitas Tanjungpura, Pontianak.
2. Lecture of Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Science, Universitas Tanjungpura, Pontianak.

ABSTRACT

This study aimed to analyze the factors that caused the Implementation of the Zoning System in the Admission of Junior Public School New Students in Pontianak City not optimal yet. This study focused on the factors that affected the implementation success. This research used exploratory descriptive study with a qualitative approach. The techniques of data collection were interview and documentation. This study used Van meter and Van Horn Budi Winarno's theory (2007: 155) which consisted of Measurement and Objectives, Resources, Communication between Organization, Implementing Agencies Characteristics, Political, Economy, and Social Condition, and Implementing Tendencies. The results showed that the implementation of the zoning system in the Admission of Junior State School New Students in Pontianak City was not optimal yet because of the insufficient school capacity. Broadly Speaking, The Education and Culture Ministry Regulation Number 44 of 2019 measurement and objectives were not good enough because the school capacity was not adequate. Before implementing the zoning system and implementing the equal education distribution that only focuses on students, the researcher suggests that the central government and the local government must distribute education evenly in all schools and build new public schools in zoning areas where there is a lack of public schools to meet the national education standards.

Keywords: Implementation, Policy, Zoning System

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa” dan untuk itu setiap warga Negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai minat dan bakat yang dimiliki tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Pemerataan kesempatan dan pencapaian mutu pendidikan akan membuat warga Negara Indonesia memiliki keterampilan hidup (*life skill*) sehingga memiliki kemampuan untuk mengenal dan mengatasi masalah diri dan lingkungannya, mendorong tegaknya masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai – nilai Pancasila. Pendidikan merupakan kebutuhan setiap individu dan selalu berubah mengikuti perkembangan zaman.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2018, dalam menerapkan penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah sebesar 90%, jalur prestasi sebesar 5% dan jalur perpindahan domisili sebesar 5%. Pada bulan Desember 2018 Mendikbud merevisi kebijakan zonasi

dengan permendikbud no 51 Tahun 2018, dengan menerapkan penerimaan peserta didik baru pada sistem zonasi sekolah dengan jarak zonasi 80%, jalur zonasi 15% dan jalur perpindahan 5%. Dan pada tahun 2019 sistem zonasi direvisi kembali dengan Mendikbud Nadim Makariem pada permendikbud no 44 Tahun 2019 dengan jalur zonasi minimal 50%, jalur afirmasi 15%, jalur perpindahan 5% dan jalur prestasi 30%.

Jumlah kuota Peserta Didik Baru yang dapat diterima oleh masing-masing SMA Negeri di Kota Pontianak sesuai dengan ketersediaan rombongan belajar. Ketersediaan rombongan belajar dari masing-masing sekolah tersebut hanya dapat menerima sebanyak 4929 calon peserta didik. Namun, pada proses pelaksanaannya, terdapat beberapa masalah yaitu belum optimalnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan zonasi tersebut. Beberapa orang tua dan murid masih belum mengetahui bahwa pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun pelajaran 2019 lebih mengutamakan peserta didik yang bertempat tinggal di sekitar sekolah, sehingga orang tua murid mengalami kebingungan pada saat melakukan pendaftaran. Adapun masalah lainnya yaitu tidak semua satuan pendidikan dapat menerima calon peserta didik sesuai dengan daya tampung yang telah ditentukan ketika sekolah berada di zona padat daya tampung sekolah tersebut sedikit dan ketika

sekolah berada di zona yang tidak padat dan daya tampung sekolah banyak.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerapkan sistem zonasi. Sekolah wajib menerima calon peserta didik baru yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit minimal 50% dari total jumlah peserta didik yang diterima. Dan pada Domisili calon peserta didik tersebut berdasarkan alamat pada kartu keluarga. Radius zona terdekat ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi daerah dengan memperhatikan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut. Penetapan radius zona pada sistem zonasi ditentukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan musyawarah atau kelompok kerja kepala sekolah. Sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi atau kota atau kabupaten ketentuan persentase dan radius zona terdekat ditetapkan melalui kesepakatan tertulis antara pemerintah daerah yang saling berbatasan. Sekolah dapat menerima calon peserta didik sebesar 50% pada zona terdekat dengan sekolah dan 50% lagi dari total jumlah peserta didik dibagi menjadi tiga kriteria, yaitu 30% untuk jalur prestasi 15% jalur afirmasi (pengguna kartu Indonesia pintar), 5% untuk peserta didik yang mengalami perpindahan domisili. Berdasarkan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 dan pelaksanaan pendaftaran dilakukan

secara online.

Terkait permasalahan pelaksanaan kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMP Negeri di Kota Pontianak ini, peneliti mengambil sampel dari seluruh SMP Negeri di Kota Pontianak untuk diteliti lebih lanjut. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait “Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMPN Kota Pontianak”.

2. Identifikasi Masalah

1. Kapasitas daya tampung sekolah SMPN Kota Pontianak tidak memadai
2. Kewajiban menerima minimum jalur zonasi 50%, jalur afirmasi (pemegang Kartu Indonesia Pintar) 15%, jalur perpindahan 5% dan jalur prestasi 30% yang tidak optimal.

3. Fokus Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup kajian Implementasi Kebijakan mencakup aspek proses dan aspek faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi.

Dalam penelitian ini di fokuskan pada aspek faktor yang mempengaruhi keberhasilan Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Penerimaan

Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Pontianak.

4. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

Apa faktor yang menyebabkan Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMPN Kota Pontianak belum optimal ?

5. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini mengacu pada permasalahan yang telah disebutkan di atas yaitu:
Mengetahui dan mendeskripsikan faktor yang menyebabkan Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMPN Kota Pontianak belum optimal.

6. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran, informasi, dan pengetahuan bagi studi Ilmu Administrasi Publik khususnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan publik.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Pemerintah

Dapat memberikan masukan terhadap Pemerintah Kota Pontianak agar dapat menangani permasalahan kebijakan sistem zonasi pada PPDB di Kota Pontianak

2) Bagi Peneliti

Bagi Peneliti, penelitian ini merupakan sarana untuk berlatih dalam pengembangan ilmu pengetahuan melalui kegiatan penelitian serta menambah wawasan peneliti agar berpikir secara kritis dan sistematis dalam menghadapi permasalahan yang terjadi kaitannya dengan kebijakan publik.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan pada dasarnya diartikan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai, dan tindakan-tindakan yang terarah. Kata kebijakan adalah terjemahan dari kata Inggris "policy" yang diterjemahkan dengan "kebijakan" yang berbeda artinya dengan kata "wisdom" yang artinya "kebijaksanaan". Kebijakan mempunyai definisi yang kompleks dan beragam yang tidak hanya menitik beratkan pada satu disiplin ilmu saja, namun harus didasarkan pada berbagai disiplin ilmu lainnya seperti

ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu sosiologi, ilmu antropologi dan lain-lain.

Subarsono (2005:3) dalam bukunya “Analisis Kebijakan Publik” mengemukakan bahwa “Kebijakan publik dapat berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Provinsi, Peraturan Pemerintah Kota/Kabupaten dan Putusan Walikota/Bupati”. Berdasarkan pendapat tersebut kebijakan publik bisa berupa undang-undang, Peraturan Pemerintahan, Peraturan Pemerintahan Provinsi, Peraturan Kota/Kabupaten dan Putusan Walikota/Bupati.

Berdasarkan pengertian diatas bahwa kebijakan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang individu, kelompok, atau pemerintah dalam menghadapi sebuah masalah dalam ruang lingkup suatu lingkungan. Kebijakan ini digunakan sebagai alat untuk menyelesaikan masalah –masalah sehingga dapat Melihat kepada pengertian mengenai kebijakan diatas maka kebijakan itu berbeda dengan keputusan, kebijakan tidak sepenuhnya dapat dibedakan dari administrasi, tapi kebijakan mencakup perilaku dan harapan, serta adatidaknya tindakan, kebijakan mempunyai hasil akhir, kebijakan mempunyai tujuan, dan sasaran balik secara eksplisit maupun implisit, kebijakan muncul dari suatu proses, kebijakan meliputi hubungan antara organisasi maupun intra organisasi, kebijakan

publik menyangkut lembaga-lembaga pemerintah serta kebijakan dirumuskan dan didefinisikan secara subyektif.

Anderson yang dikutip oleh Agustino (2016:17) dalam bukunya “Dasar-Dasar Kebijakan Publik” memberikan pengertian atas definisi kebijakan publik sebagai berikut: “Serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan”.

Konsep kebijakan ini menitik beratkan pada yang sesungguhnya dikerjakan dari pada apa yang diusulkan atau dimaksud. Dan hal inilah yang membedakan kebijakan dari suatu keputusan yang merupakan pilihan diantara beberapa alternatif yang ada.

Menurut Anderson (Widodo 2010, 13) kebijakan publik adalah sebagai suatu respons dari sistem politik terhadap demands atau claims dan supports yang mengalir dari lingkungannya. Berdasarkan pengertian ini, Dye (dalam Widodo 2012, 13) mengemukakan dalam sistem kebijakan terdapat tiga elemen, yaitu, a) kebijakan publik, b) pelaku kebijakan, c)lingkungan kebijakan. Musopadijaja menambahkan satu elemen, yaitu kelompok sasaran kebijakan (target groups).

Anderson yang dikutip oleh Agustino (2016:17) dalam bukunya “Dasar-Dasar Kebijakan Publik” memberikan pengertian atas definisi kebijakan publik sebagai berikut: “Serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan”.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan sesungguhnya bukan sekedar berhubungan dengan penerjemahan pertanyaan kebijakan (policy statement). Dalam aktifitas implementasi terdapat berbagai faktor-faktor yang akan mempengaruhi terlaksananya kegiatan atau kebijakantesebutadalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi dengan model kebijakan telah banyak dikemukakan oleh para banyak ahli kebijakan.

3. Donal van Meter dan Carl van Horn

Teori yang dikemukakan oleh van Meter dan van Horn (Budi Winarno, 2007:155-165) ada enam faktor atau

variabel-variabel yang mempengaruhi kinerja publik tersebut. Keenam faktor-faktor atau variabel-variabel tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan

Variabel ini didasarkan pada kepentingan utama terhadap faktor-faktor yang menentukan kinerja kebijakan. Menurut van Meter dan van Horn, identifikasi indikator-indikator kinerja merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. indikator-indikator kinerja ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan dan tujuan berguna dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh.

2. Sumber-sumber Kebijakan

Disamping ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses implementasi kebijakan adalah sumber-sumber yang tersedia. Sumber-sumber layak mendapatkan perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. sumber-sumber yang dimaksud mencakup dana atau perangsang (incentive) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif. Dalam praktik implementasi kebijakan, kita seringkali mendengar para pejabat maupun pelaksana mengatakan bahwa kita tidak mempunyai cukup dana.

Implementasi akan berjalan efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dipahami oleh

3. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

individu-individu yang bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan. dengan begitu, sangat penting untuk memberi perhatian yang besar kepada kejelasan ukuran-ukuran dasar tujuan-tujuan kebijakan, ketetapan komunikasinya dengan para pelaksana dan konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan-tujuan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi. Menurut van Meter dan van Horn, implementasi yang berhasil seringkali membutuhkan mekanisme-mekanisme dan prosedur-prosedur lembaga. Hal ini sebenarnya akan mendorong kemungkinan yang lebih besar bagi pejabat-pejabat tinggi (atasan) untuk mendorong pelaksana (pejabat-pejabat bawahan) bertindak dalam suatu cara yang konsisten dengan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan. para pejabat dalam organisasi mempunyai pengaruh oleh karena posisi hierarkhis mereka. Dalam hubungan-hubungan antarorganisasi maupun antar pemerintah, dua tipe kegiatan pelaksana merupakan hal yang paling penting. Pertama, nasihat dan bantuan teknis yang dapat diberikan. Pejabat-pejabat tingkat tinggi seringkali dapat melakukan banyak hal untuk memperlancar implementasi kebijakan dengan jalan membantu pejabat-pejabat bawahan menginterpretasikan peraturan-peraturan dan garis-garis pedoman pemerintah, menstrukturkan tanggapan-tanggapan terhadap inisiatif-inisiatif dan memperoleh sumber-sumber fisik dan teknis yang diperlukan yang

Fitri Gunawan

Administrasi Publik Universitas Tanjungpura

berguna dalam melaksanakan kebijakan. kedua, atasan dapat menyadarkan pada berbagai sanksi, baik positif maupun negatif. Menurut van Meter dan van Horn, kita dapat menyelidiki aspek pelaksanaan ini dengan menunjuk kepada perbedaan antara kekuasaan normatif, renumeratif, dan kekuasaan koersif.

4. Karakteristik badan-badan pelaksana

Dalam melihat karakteristik badan-badan pelaksana, seperti dinyatakan oleh van Meter dan van Horn, maka pembahasan ini tidak bisa lepas dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan. komponen dari model ini terdiri dari ciri-ciri struktur formal dari organisasi-organisasi dan atribut-atribut yang tidak formal dari personil mereka.

5. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial, dan politik

Dampak kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik pada kebijakan publik merupakan pusat perhatian yang besar selama dasawarsa yang lalu. Para peminat perbandingan politik dan kebijakan public secara khusus tertarik dalam mengidentifikasi pengaruh variabel-variabel lingkungan pada hasil-hasil kebijakan. sekalipun dampak dari faktor-faktor ini pada implementasi keputusan-keputusan kebijakan mendapat perhatian yang kecil, namun menurut

van Meter dan van Horn, faktor-faktor ini mungkin mempunyai efek yang mendalam terhadap pencapaian badan-badan pelaksana.

6. Kecenderungan pelaksana (implementors)

Pada tahap ini pengalaman-pengalaman subyektifitas individu memegang peran yang sangat besar. van Meter dan van Horn berpendapat bahwa setiap komponen dari model yang dibicarakan sebelumnya harus disaring melalui persepsi pelaksana dalam yurisdiksi dimana kebijakan tersebut dihasilkan. Mereka kemudian mengidentifikasi tiga unsur tanggapan pelaksana yang mungkin memengaruhi kemampuan dari keinginan mereka untuk melaksanakan kebijakan, yakni: kognisi (komprehensi, pemahaman) tentang kebijakan, macam tanggapan terhadapnya (penerimaan, netralitas, penolakan) dan intensitas tanggapan itu. Arah kecenderungan-kecenderungan pelaksana terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan juga merupakan suatu hal yang sangat penting. Para pelaksana mungkin gagal dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan dengan tepat karena mereka menolak tujuan-tujuan yang terkandung dalam kebijakan-kebijakan tersebut. Dan begitu sebaliknya, penerimaan terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan yang diterima secara luas oleh para pelaksana kebijakan akan menjadi pendorong bagi implementasi kebijakan yang berhasil. Menurut van Meter dan van Horn, ada beberapa alasan

mengapa tujuan-tujuan suatu kebijakan ditolak oleh orang-orang yang bertanggung jawab terhadap implementasi kebijakan tersebut, yakni: tujuan-tujuan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya mungkin bertentangan dengan system nilai pribadi para pelaksanaan, kesetiaan-kesetiaan ekstra organisasi, perasaan akan kepentingan diri sendiri, atau karena hubungan-hubungan yang ada dan yang lebih disenangi. Dengan gejala seperti ini, maka dapat dikatakan dengan bahasa yang lebih singkat bahwa kelompok-kelompok manusia menemui kesulitan untuk melaksanakan tindakan-tindakan secara efektif karena mereka tidak mempunyai kepercayaan-kepercayaan yang mendasari tindakan-tindakan tersebut.

4. Hasil Penelitian Yang Relevan

Berdasarkan dalam rangka mendukung penelitian yang akan dilakukan perlu adanya perbandingan dengan penelitian terdahulu yang relevan atau yang berkaitan penelitian yang bertujuan untuk membandingkan dan memperkuat hasil penelitian yang dilakukan merujuk dari beberapa studi, yang berkaitan langsung maupun yang secara tidak langsung.

1. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kartika Marini Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung dengan adanya letak perbedaan, pertama : judul skripsi Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Pada SMA Negeri di Kota Bandar Lampung serta tujuan Mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMA Negeri di Kota Bandar Lampung khususnya SMAN 9 Bandar Lampung dan SMAN 14 Bandar Lampung. Adapun permasalahan penelitian yang dilakukan oleh Kartika Marini ini adalah hambatan implementasi kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMA Negeri di Kota Bandar Lampung khususnya SMAN 9 Bandar Lampung dan SMAN 14 Bandar Lampung. Teori dalam penelitian ini menggunakan teori Van Metter Van Horn ada beberapa variabel yang mempengaruhi agar implementasi kebijakan dapat berhasil secara sempurna, yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap kecenderungan (disposition) para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana Lingkungan sosial, politik dan ekonomi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi yang belum maksimal yang dilakukan Pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan banyak hambatan yang ditemukan dalam pengimplementasian kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) khususnya di

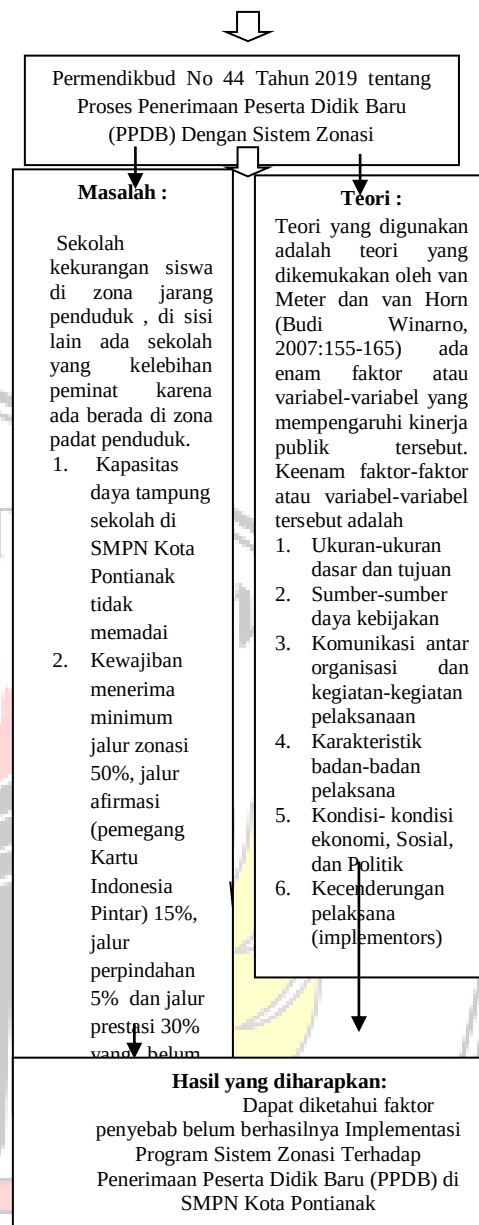
SMAN 9 Bandar Lampung dan SMAN 14 Bandar Lampung, yaitu aplikasi *online* yang disediakan mengalami gangguan, jaringan yang ada di SMAN 14 Bandar Lampung kurang memadai, aturan besaran kuota diluar zonasi yakni jalur prestasi baik akademik maupun non akademik membuat tidak terpenuhinya daya tampung yang ada di SMAN 14 Bandar Lampung, pola pikir masyarakat terhadap sekolah-sekolah unggulan masih belum berubah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah mengkaji tentang Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Pontianak. Metode yang digunakan dalam penelitian sama-sama menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berdasarkan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Perbedaannya dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada lokasi dan teori yang digunakan. Lokasi dalam penelitian ini adalah di Kota Bandar Lampung, sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti berada di Kota Pontianak Kalimantan Barat.

5. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Penerimaan Peserta Didik

Baru (PPDB) di SMPN Kota Pontianak dilihat dari faktor ukuran dan tujuannya ?

2. Bagaimana Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMPN Kota Pontianak dilihat dari faktor sumber daya ?
3. Bagaimana Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMPN Kota Pontianak dilihat dari faktor komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan ?
4. Bagaimana implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMPN Kota Pontianak dilihat dari faktor karakteristik badan-badan pelaksana ?
5. Bagaimana Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMPN Kota Pontianak dilihat dari faktor kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik ?
6. Bagaimana Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMPN Kota Pontianak dilihat dari kecenderungan pelaksana (implementors) ?



Sumber : Data di olah oleh penulis 2019

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Tabel 2.3.1

Bagan Kerangka Pikir Penelitian

Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMPN Kota Pontianak

ngapura

Penelitian ini ingin mengungkapkan secara jelas keadaan dilapangan mengenai Kebijakan Penerimaan peserta Didik Baru (PPDB) di SMPN Kota Pontianak penelitian ini disajikan berdasarkan fenomena nyata yang terjadi dilapangan. Sehingga penelitian ini bersifat deskriptif melalui penelitian deskriptif yaitu mendeskripsikan secara rinci fenomena sosial yang berhubungan dengan proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMPN Kota Pontianak. Penelitian ini bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diamati dan untuk mengetahui pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMPN Kota Pontianak.

2. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah dalam penulisan penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi membuat sebuah rancangan penelitian yaitu suatu kesatuan rencana terperinci dan spesifik. Berdasarkan buku paduan penyusunan skripsi Fisip Universitas Tanjungpura tahun 2019 langkah-langkah penelitian meliputi pra survey, penyusunan outline, penyusunan usulan penelitian, seminar, penelitian lapangan penyusunan laporan hasil penelitian, dan ujian skripsi. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penelitian pendahuluan (pra lapangan)
2. Pengajuan Judul Penelitian dan Outline
3. Membuat rencana penelitian dan proposal penelitian
4. Turun ke Lapangan
5. Pengumpulan Data
6. Membuat Laporan Penelitian (Skripsi)

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data peneliti yang akurat. Adapun lokasi yang menjadi tempat penelitian ini yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak. Alasan yang menjadi dasar pemilihan lokasi penelitian tersebut adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak sebagai pengawas dan yang membuat Petunjuk Teknis kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMP Negeri se Kota Pontianak, sementara untuk kasusnya yakni SMP Negeri di Kota Pontianak yang mengimplementasikan kebijakan tersebut sehingga dapat dijadikan perbandingan tingkat keberhasilan pelaksanaan

kebijakan. Adapun waktu penelitian dilakukan pada awal bulan Agustus 2019.

4. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek Penelitian

Penentuan subjek penelitian ini dilakukan dengan cara teknik *purposive* yang dinyatakan cocok dengan masalah yang di bahas, yaitu penentuan subjek didasarkan atas tujuan mengungkap masalah yang diangkat dalam penelitian. Subjek penelitian ditentukan berdasarkan orang yang dianggap paling mengetahui tentang informasi yang dibutuhkan dalam penelitian sehingga akan memudahkan peneliti dalam menelusuri situasi dalam penelitian. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak .
2. Ka. Subbag Umum dan Aparatur (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak) .
3. Kabid Pendidikan Dasar (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak) .
4. Kepala Sekolah SMPN Kota Pontianak
5. Orang Tua Murid yang diterima atau Masyarakat.

Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMPN Kota Pontianak.

5. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan beberapa teknik supaya memperoleh data yang lengkap, yaitu sebagai berikut:

1. Metode Wawancara

Menurut Esterberg (dalam Sugiyono, 2009:72) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.

2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk mengungkapkan dan melengkapi informasi yang berhubungan dengan pokok permasalahan, dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan,

dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

6. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a) Panduan Wawancara (interview Guide)
Pedoman wawancara berisi tentang butir-butir pertanyaan yang diberikan kepada subjek peneliti untuk dijawab sesuai dengan keadaan.
- b) Pedoman Dokumentasi
Pedoman dokumentasi berupa petunjuk untuk memperoleh data-data dari organisasi berupa catatan, transkrip, buku, surat, majalah dan sebagainya.

7. Teknik analisis data

Dalam penelitian kualitatif data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data triangulasi dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data taksonomi, yaitu menganalisis data secara keseluruhan setelah menentukan fokus penelitian secara lebih rinci dan mendalam. Menurut Miles dan Huberman (dalam sugiyono, (2011:91) Aktivitas dalam analisis data, yaitu data

reduction, data display, dan onclusionondrawing/ verification. Berikut ini adalah penjelasan dari ketiga aktivitas analisis tersebut:

1. Reduksi Data
2. Penyajian Data
3. Verifikasi

8. Teknik keabsahan data (uji validitas)

Uji keabsahan data (dalam sugiyono, 2009:117) merupakan derajat ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data “yang tidak berbeda” antara data yang dilaporkan peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian.

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Untuk menguji kredibilitas data dalam penelitian ini, maka diperlukan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak serta wawancara kepada murid yang tidak diterima dan wawancara kepada masyarakat Kota Pontianak. Kemudian membandingkan data yang diperoleh dari pengamatan langsung yang ada dilapangan dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara kebeberapa informan yang telah ditetapkan.

D. Hasil Penelitian

Sistem Zonasi Terhadap Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMPN Kota Pontianak. Kebijakan sistem zonasi adalah salah satu kebijakan pendidikan pada Penerimaan Peserta Didik Baru yang diatur dalam Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019. Implementasi sistem zonasi ini dimaksudkan untuk menghilangkan diskriminasi pendidikan sehingga kualitas pendidikan mampu untuk disamaratakan. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, tujuan implementasi sistem zonasi yaitu pemerataan kualitas pendidikan di setiap sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Gresik. Peserta didik yang berprestasi bisa menyebar di seluruh wilayah dan tidak hanya berkumpul pada sekolah-sekolah tertentu saja. Tujuan kebijakan sistem zonasi ini diwujudkan dalam sebuah implementasi atau pelaksanaan sejalan dengan pendapat Van Meter dan Van Horn (Rusdiana, 2015:132) yang menyampaikan pendapatnya mengenai implementasi kebijakan dimaksudkan sebagai keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditentukan.

Pelaksanaan sistem zonasi pada PPDB di Kota Pontianak ini berdasarkan pada Permendikbud No 44 tahun 2019, kemudian Dinas Pendidikan mengeluarkan Pedoman Teknis PPDB yang

Fitri Gunawan

Administrasi Publik Universitas Tanjungpura

didalam mengatur mengenai mekanisme kegiatan PPDB secara lengkap dan rinci yang terkait dengan ketentuan umum, daftar pembagian zona, jalur seleksi hingga jadwal pelaksanaan PPDB.

1. Pembahasan

Pembahasan sangat diperlukan untuk penyusunan laporan penelitian, pembahsan merupakan laporan hasil kegiatan penelitian yang berupa data yang didapat dari pengumpulan data, hasil observasi dan wawancara. Pembahasan bertujuan untuk menunjukkan bagaimana tujuan penelitian yang diperoleh dan menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian.

Pelaksanaan kebijakan adalah suatu proses kebijakan yang dinamis dimana tujuan akhir dari pelaksanaannya untuk mendapat hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan itu sendiri demi kepentingan publik.

2. Fakator-Faktor Yang Menyebabkan Implementasi Sistem Zonasi Terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMPN Kota Pontianak

Dalam penelitian ini untuk menganalisis dan mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan Implementasi Sistem Zonasi Terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMPN Kota Pontianak belum optimal, agar kedepan kebijakan sistem zonasi

pada PPDB di SMPN Kota Pontianak ini terus di perbaiki dengan optimal. Peneliti menggunakan model teori Van Meter dan Van Horn yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana, karakteristik badan pelaksana, kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik dan kecenderungan pelaksana.

Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Ukuran dan tujuan kebijakan didasarkan pada kepentingan utama terhadap faktor-faktor yang menentukan kinerja kebijakan. Identifikasi indikator-indikator kinerja merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan, indikator-indikator kinerja ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan berguna dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh.

Sumber-Sumber Daya

Disamping ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses implementasi kebijakan adalah sumber-sumber yang tersedia. Sumber-sumber layak mendapatkan perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. sumber-sumber yang dimaksud mencakup dana atau perangsang (incentive) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif.

Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan-kegiatan Pelaksanaan

Implementasi akan berjalan efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan. dengan begitu, sangat penting untuk memberi perhatian yang besar kepada kejelasan ukuran-ukuran dasar tujuan-tujuan kebijakan, ketetapan komunikasinya dengan para pelaksana dan konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan-tujuan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi. Implementasi yang berhasil seringkali membutuhkan mekanisme-mekanisme dan prosedur-prosedur lembaga. Hal ini sebenarnya akan mendorong kemungkinan yang lebih besar bagi pejabat-pejabat tinggi (atasan) untuk mendorong pelaksana (pejabat-pejabat bawahan) bertindak dalam suatu cara yang konsisten dengan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan. para pejabat dalam organisasi mempunyai pengaruh oleh karena posisi hierarkhis mereka. Dalam hubungan-hubungan antarorganisasi maupun antar pemerintah, dua tipe kegiatan pelaksana merupakan hal yang paling penting.

Karakteristik Badan-badan Pelaksana

Dalam melihat karakteristik badan-badan pelaksana,, maka pembahasan ini tidak bisa lepas dari strukur birokrasi. Struktur

birokrasi diartikan sebagai karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan. komponen dari model ini terdiri dari ciri-ciri struktur formal dari organisasi-organisasi dan atribut-atribut yang tidak formal dari personil mereka. Diatas dapat di gambarkan Dalam penelitian ini, pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melibatkan banyak pihak diantaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, seluruh Kepala Sekolah SMPN Kota Pontianak, calon siswa dan orang tua. Dalam hal komunikasi, segala hal terkait pelaksanaan PPDB mampu dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan baik.

Kondisi-kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik

Dampak kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik pada kebijakan publik merupakan pusat perhatian yang besar selama dasawarsa yang lalu. Para peminat perbandingan politik dan kebijakan publik secara khusus tertarik dalam mengidentifikasi pengaruh variabel-variabel lingkungan pada hasil-hasil kebijakan. sekalipun dampak dari faktor-faktor ini pada implementasi keputusan-keputusan kebijakan mendapat perhatian yang kecil, namun faktor-faktor ini mungkin mempunyai efek yang

mendalam terhadap pencapaian badan-badan pelaksana.

Kecenderungan Pelaksana

Pada tahap ini pengalaman-pengalaman subyektifitas individu memegang peran yang sangat besar. van Meter dan van Horn berpendapat bahwa setiap komponen dari model yang dibicarakan sebelumnya harus disaring melalui persepsi pelaksana dalam yurisdiksi dimana kebijakan tersebut dihasilkan. Mereka kemudian mengidentifikasi tiga unsur tanggapan pelaksana yang mungkin memengaruhi kemampuan dari keinginan mereka untuk melaksanakan kebijakan, yakni: kognisi (komprehensi, pemahaman) tentang kebijakan, macam tanggapan terhadapnya (penerimaan, netralitas, penolakan) dan intensitas tanggapan itu.

E.PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diisampaikan kesimpulan bahwa implementasi kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMPN Kota Pontianak belum optimal. Hal ini terlihat dari masih banyaknya orang tua siswa yang belum bisa menyekolahkan anaknya di SMPN Kota Pontianak . Implementasi Sistem Zonasi pada PPDB belum berjalan dengan optimal yaitu,

1. Ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan : ukuran dan tujuan kebijakan sistem zonasi ini belum optimal dikarenakan pemerintah terlalu gegabah dalam menerapkan sistem zonasi ini. dari 2017 sistem zonasi ini di terapkan dengan berbagai macam evaluasi namun tetap saja menuai polemik setiap tahunnya. Masalah yang paling utama adalah kapasitas daya tampung pada SMPN Kota Pontianak yang kurang, sehingga banyak orang tua yang resah anaknya tidak bisa sekolah dikarenakan sekolah penuh. Banyak orang tua yang protes dan kecewa. Secara umum, rancangan sistem PPDB akan bergantung pada tujuan pemerintah. Rancangan sistem PPDB yang ditujukan untuk mengurangi segregasi akan berbeda dengan yang didesain untuk meningkatkan efisiensi pembelajaran. Oleh karena itu, untuk mendapatkan tujuan yang tepat, pemerintah harus terbuka dalam melihat permasalahan yang ada di lapangan. Sumber daya Kebijakan : mengenai sumber daya/ sumber dana ini cukup berpengaruh agar implementasi kebijakan sistem zonasi dapat berjalan optimal. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kota Pontianak dan Kepala sekolah SMPN 6 sumber dana yang diberikan cukup untuk menjalankan PPDB. Jadi secara implementasi penyaluran dana/ anggaran cukup optimal, karena apa yang diterangkan kedua narasumber berkaitan dengan anggaran dalam implemntasi sudah cukup.

2. Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan-kegiatan Pelaksanaan : Komunikasi dan koordianasi merupakan yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik, semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalah-kesalahan akan sangat kecil terjadi dan begitu pula sebaliknya. komunikasi sangat berpengaruh terhadap kinerja pelaksana kebijakan yang dilaksanakan oleh badan organisasi. Seluruh agen pelaksana PPDB telah melakukan tugasnya dengan baik sesuai dengan ketentuan dalam Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019, serta Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

3. Karakteristik Badan Pelaksana : Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Pontianak melibatkan banyak pihak diantaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, seluruh Kepala Sekolah SMPN Kota Pontianak, calon siswa dan orang tua. Dalam hal komunikasi, segala hal terkait pelaksanaan PPDB mampu dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan baik. Mulai dari sosialisasi, persiapan, pelaksanaan, PPDB, pengawasan hingga pelaporan hasil akhir sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak.

4. Kondisi-Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik : Banyak hal yang diuntungkan dengan adanya

sistem zonasi, dengan adanya sistem zonasi diharapkan pemerataan kualitas sekolah di tiap-tiap daerah dapat tercapai, serta memudahkan dalam memantau tiap-tiap sekolah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan disetiap sekolah seperti sarana prasarana sekolah yang memadai. Dari segi ekonomi orang tua juga tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi karena sekolah yang dapat dijangkau dengan mudah. Sistem zonasi ini dinilai positif oleh banyak kalangan. keadaan ekonomi adalah salah satu keadaan yang sangat mendukung keberhasilan dalam pelaksanaan sistem zonasi ini.

5. Aparatur pemerintah di tingkat Dinas Pendidikan Kota Pontianak sangat mendukung saran-saran apapun yang disampaikan oleh masyarakat terkait sistem zonasi. Pelayanan dan penjelasan dari Dinas Pendidikan terkait sistem zonasi ini sangat terbuka dan masyarakat bisa langsung bertemu dengan pihak terkait dengan pelaksanaan PPDB.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa saran untuk membuat implementasi kebijakan sistem zonasi ini dapat dinilai efektif dan efisien, adalah sebagai berikut:

Secara garis besar ukuran dan tujuan dari Permendikbud No 44 Tahun 2019 sudah cukup baik namun sebelum menjalankan sistem

Fitri Gunawan

Administrasi Publik Universitas Tanjungpura

zonasi tersebut, sebelum melakukan pemerataan pendidikan yang hanya terfokus pada siswa, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk memenuhi standar nasional pendidikan haruslah merata di seluruh sekolah dan membangun sekolah-sekolah Negeri baru di wilayah-wilayah zonasi yang sekolah negerinya minim.

Sumber dana yang digunakan oleh Pelaksana PPDB seperti yang dikatakan oleh narasumber sudah cukup. Jadi sumber dana yang mengalir pada pelaksanaan PPDB di Kota sudah cukup baik.

Komunikasi antar pelaksanaan ketika melaksanakan kebijakan berkoordinasi dengan baik, harus lebih maksimal lagi untuk sosialisasi dengan masyarakat terkait kebijakan zonasi ini, karena masih banyak masyarakat yang mau mendaftarkan anaknya sekolah belum paham tentang juknis dan masih kebingungan. Walaupun Dinas Pendidikan Kota Pontianak sudah mensosialisasikan dengan bermacam-macam media. Namun tidak semua masyarakat melihat media tersebut, harus ada semacam gerakan sosialisasi jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan PPDB dimulai.

Kebijakan sistem zonasi ini pasti menuai pro dan kontra di masyarakat. Kendati bertujuan untuk pemerataan mutu pendidikan, Ketua Dewan Pendidikan Surabaya Martadi menyebut ada beberapa hal yang harus dibenahi. Sistem

zonasi memiliki tujuan baik untuk meratakan penyebaran murid. Namun tidak hanya murid yang dilakukan pemerataan, tetapi guru juga harus dilakukan pemerataan.

REFERENSI

1. Buku-buku

Agustino, Leo, 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

Agustino, Leo, 2017. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

Anggara, S. (2012). *Ilmu Administrasi Negara (kajian konsep, teori, dan fakta dalam upaya menciptakan good governance)*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Nugroho, Riant.2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Pt Elex Media Komputindo.

Rusli, B. (2015). *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*. Bandung: CV. ADOYA Mitra Sejahtera

Subarsosno. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori Dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2011. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Kepenyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta

2. Peraturan Perundang-Undangan

Permendikbud NO. 44 Tahun 2019

3. Jurnal

Marini, Kartika. 2019. "Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada SMA Negeri di Kota Bandar Lampung". Di ambil pada tgl 20 Desember 2019 dari <http://digilib.unila.ac.id/56650/4/SKRIPS I%20TANPA%20BAB%20PEMBAHAS AN.pdf>

Lailatul, Umi. 2018. " Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Perspektif Stakeholder Sekolah." Diambil pada Tgl 20 Desember 2019 dari <http://etheses.uin-malang.ac.id/14587/1/16710030.pdf>